

DINAMIKA ELIT LOKAL DI ACEH TERHADAP PENGUASA (Konstruksi, Legitimasi dan Eksistensi)

Danil Akbar Taqwadin

Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

Contributor Email: danylabay@gmail.com

Abstrak

The history of Aceh in the last century is a cycle of conflict and peace. The presence of conflict and peace is also inseparable from the involvement of the authorities, both during the colonial period and the Aceh compilation which had joined Indonesia. In this case, the ruler does not move alone but is related to no elite at the local level. Therefore, using qualitative analysis and literature and observation methods, this article discusses the construction of the elite, the legitimacy gained, and the existence of the elite in political politics in Aceh, both during the Dutch colonial period and Aceh as a part of Indonesia. This exploration shows that there are differences in the pattern of elite construction, the legitimacy obtained, and the existence of the elite in relations with the authorities. This difference is seen in the pattern of the boss changing local to local strongmen and vice versa. Likewise, the legitimacy is obtained by an elite based on rational law for charismatics and then back again to rational law. Hopefully, this study can add to the academic treasure of Aceh politics from a different perspective.

Keywords: *Local Elite, Local Figure, Local Bossism, Aceh*

A. Pendahuluan

Sejarah Aceh se-abad terakhir adalah sebuah siklus dari konflik ke damai dan konflik kembali. Karena itu, ketika damai hadir, kerap muncul pertanyaan “kapan konflik terjadi lagi? Atau sebaliknya ketika konflik berlangsung, “kapan damai akan datang menghampiri?” Bagi masyarakat Aceh, pertanyaan ini mungkin terasa membosankan atau sesuatu yang tidak asing.

Persoalan tentang mengapa Aceh berkonflik, lahirnya kekerasan, para aktor-aktornya, tujuan yang diusung, pendekatan perlawanan dan pola kekerasan, akhir dari perlawanan, tampaknya begitu banyak diteliti oleh berbagai sarjana dengan menggunakan berbagai perspektif keilmuan dari sejarah, kajian konflik dan perdamaian, politik, hukum,

dsb.¹ Namun, pertanyaan tentang mengapa Aceh terus bertahan menjadi bahagian dari penguasa baik pada era kolonial ataupun setelah menjadi bagian Indonesia tampaknya luput dari perhatian masyarakat Akademik. Karena itu pada kajian ini, hipotesa yang diangkat adalah dinamika politik para elit lokal yang membuat Aceh semakin terintegrasi dalam kuasa colonial dan Pemerintah Indonesia. Sehingga membuat upaya perlawanan secara *soft*, pemberontakan atau pemisahan diri yang pernah dilakukan oleh masyarakat atau bahkan elit Aceh sendiri sebelumnya tidak pernah mencapai tujuan yang diinginkan.²

Selama sejarah konflik-damai tersebut pula (1904-2020), Aceh 'dikuasai'³ oleh segelintir elit yang berasal dari beragam latar belakang golongan seperti *uleebalang*, ulama, teknokrat, intelektual, politisi, birokrat, ex-kombatan, pelaku ekonomi hingga masyarakat sipil. Karena itu, pertanyaan dalam kajian ini adalah bagaimana konstruksi elit dan hubungannya dengan penguasa baik ketika kolonial berkuasa ataupun saat menjadi bahagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penguasa - baik Belanda maupun Pemerintah Pusat (Indonesia) - yang berlaku dalam kondisi konflik-damai di Aceh? Seperti apa bentuk legitimasi yang hadir? Dan pada prosesnya, bagaimana eksistensi elit dalam menjalankan pengaruhnya?

B. Konsep

Terminologi 'elit' berasal dari kata '*elect*' yaitu mereka - yang merupakan anggota masyarakat - yang terpilih dan terseleksi oleh Tuhan (Williams, 1958). Namun, sejak abad ke 18, makna ini kemudian bergeser menjadi 'anggota masyarakat yang terbaik'. Hal ini tampak pada definisi "*elite*" sebagai arti kata elit dalam *Oxford English Dictionary*. Istilah 'elit' pertama kali digunakan pada tahun 1823. Tetapi istilah tersebut tidak dipergunakan secara luas dalam kajian sosial-politik hingga akhir abad ke-19 di Eropa, khususnya pada

¹ Beberapa diantaranya silakan rujuk Thamrin (2004), Sukma (2004), Reid, (2005), Aspinall (2006), Prang (2008).

² Periode berlakunya konflik dan kekerasan di Aceh: Perang Aceh (1873-1911), pendudukan Belanda di Aceh (1911-1942), pendudukan Jepang (1942-1945), Perang Cumbok dan Revolusi Sosial (1945-1946), Agresi Militer Belanda (1945-1949), pemberontakan DI/TII (1953-1962), pembantaian PKI dan simpatisannya (1965-1966), pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (1976-2005).

³ Maksud dari 'dikuasai' disini ialah kekuasaan oligarki, yang mana kekuasaan dikelola oleh sekelompok orang.

periode 1930an di Inggris dan Amerika. Istilah 'elit' semakin kerap digunakan terutama setelah dipopulerkan oleh Pareto (1935).

Istilah elit lazimnya merujuk kepada individu, grup atau organisasi masyarakat yang mengontrol sejumlah besar *power* atau kekuasaan, yang lebih dari masyarakat lainnya. *Power* atau kekuasaan dimaksud merupakan kemampuan secara formal dan informal dalam mempengaruhi aktor lainnya (Dahl, 1957). Berdasarkan perbedaan yang ditekankan kepada aktor - individu, grup, atau organisasi - yang lain, seringkali para elit ini dengan sengaja memisahkan dirinya dengan masyarakat lainnya. Pada dasarnya, konsep tentang elit digunakan untuk menganalisa aktor yang - secara hirarki - mengontrol atau berada di atas masyarakat lainnya (Vergara, 2013).

Kajian ini menggunakan pandangan Pareto (1935), Mosca (1939) dan Michels (2001) dalam melihat konteks eksistensi elit dalam suatu masyarakat. Mereka menganggap kekuasaan merupakan sesuatu yang tidak merata. Artinya, terdapat dua kelompok dalam masyarakat terkait dengan kekuasaan ini, yaitu mereka yang memiliki kuasa dan mereka yang tidak. Pada konteks internal, elit cenderung bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran kelompok. Lazimnya, elit memiliki visi yang sama. Individu dalam golongan ini saling mengenal baik, memiliki nilai, kesetiaan dan kepentingan yang cenderung sama. Secara fungsi, elit mengatur sendiri kelangsungan hidup dan keanggotaannya berasal dari kelompok masyarakat yang terbatas (eksklusif). Karena itu, pemimpin dalam kelompok elit, selalu berasal dari kalangan mereka sendiri. Sifat dari kelompok ini adalah otonom, cenderung kebal akan gugatan terkait keputusan yang diambil. Dari penjelasan tersebut, Scott (1991) - dengan berkaca pada konteks tatanan politik di Inggris - secara sederhana mengumpamakan bahwa elit adalah "*a small and powerfull group*".

Menurut Scott (1991) dan Etzioni-Halevy (1993), setidaknya terdapat dua pandangan terkait proses pembentukan elit. *Pertama*, berasal dari pandangan liberal - demokratik. Pandangan ini menganggap bahwa sejatinya tidak adanya keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat. Selalu saja ada individu atau kelompok yang lebih makmur dibandingkan lainnya. Sehingga hal tersebut mempengaruhi status sosial serta tingkatan pengaruh dan kekuasaan yang dimilikinya. Karena itu, 'elit' merupakan ruang dan posisi yang diperebutkan dalam iklim yang demokratis dan ber peradaban. Sehingga, upaya terhadap tirani atau kemungkinan terhadap hadirnya kekuasaan absolut dapat dicegah dan diminimalisir.

Kedua, berasal dari pandangan Marxist. Pandangan ini menekankan pada konteks kekuasaan berpusat pada mereka yang menguasai alat-alat produksi. Marxist menyebutnya sebagai *the ruling class*. Sedangkan mereka yang tidak menguasai alat-alat produksi dan hanya semata-mata dapat bergantung pada *the ruling class* (kelas penguasa) ini disebut dengan *the proletar* (kelas yang dikuasai). Dalam hal ini, 'elit' yang dimaksud oleh Scott (1991) dan Etzioni-Halevy (1993) adalah *the ruling class* ini. Lebih lanjut, kelas penguasa ini bukan hanya sekedar menguasai alat-alat produksi, tapi juga mampu merekayasa aspek sosial masyarakat yang dikuasai.

Pada konteks sosial-politik, posisi sebagai elit memerlukan pengakuan dari masyarakat yang berada dibawahnya. Pengakuan ini disebut dengan legitimasi elit. Mosca (1939) menyebut legitimasi ini dengan '*political formula*'. Hal ini merujuk pada suatu keyakinan dan kesepahaman yang menunjukkan mengapa elit perlu didengarkan dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Pada konteks ini, Weber (1968) membagi tipikal kewenangan yang berasal dari legitimasi yang digunakan oleh elit terhadap masyarakat, yaitu: *Pertama*, kewenangan legal-rasional. Kewenangan ini berasal dari kesepakatan anggota masyarakat terhadap seperangkat aturan resmi atau lingkaran pengambil kebijakan. Artinya, muncul dan terbentuknya elit karena berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat yang berasal dari konsensus masyarakat sendiri atau pemerintah sebagai 'pengelola' masyarakat. Pada konteks ini, hubungan diantara elit dan masyarakat bersifat impersonal yaitu tidak ada kesetiaan yang bersifat pribadi dari masyarakat terhadap elit.

Kedua, kewenangan karismatik. Kewenangan ini berasal dari daya tarik yang melekat pada diri seseorang atau sekelompok orang. Karisma dapat dipandang sebagai sesuatu yang unik dan *innate*, sehingga seseorang dianggap luar biasa, memiliki keunggulan untuk mengatur dan kekuatan yang lebih daripada orang lain. *Ketiga*, kewenangan tradisional. Kewenangan ini berasal dari tradisi, norma dan nilai yang hadir dan berlaku dalam masyarakat. Pada konteks ini, terdapat masyarakat yang memiliki kepercayaan yang kuat terhadap kesucian dan kesakralan tradisi. Bentuk legitimasi seperti ini dapat dilihat pada konteks masyarakat dalam sistem masyarakat yang percaya bahwa silsilah darah sebagai mewarisi tampuk pimpinan dari kepemimpinan sebelumnya.

Pada prosesnya - terutama pada konteks masyarakat di Negara Dunia Ketiga, suatu kekuasaan lazimnya dijalankan sesuai dengan pola-pola *local strongman* (orang kuat)

ataupun *bossism* (bossisme). *Pertama, local strongman*. Menurut Migdal (2001), *local strongman* hadir akibat lemah kekuatan Negara untuk memonopoli kekuatan untuk mengatur masyarakat. Asumsinya adalah Negara (Pemerintah) sebagai sebuah organisasi terbesar dalam suatu Negara, sesungguhnya hidup berdampingan dengan organisasi-organisasi lainnya, baik berbentuk formal ataupun informal. Khususnya bagi organisasi informal, jumlahnya semakin banyak, bahkan mampu mengimbangi kekuatan Negara. Artinya, kemampuan organisasi informal dalam masyarakat mampu mengurangi legitimasi Negara sebagai satu-satunya aktor kontrol sosial yang sah. Hal ini tampak dari hadirnya tokoh-tokoh masyarakat, intelektual organik, tuan tanah, termasuk tokoh agama. *Local strongman* menempatkan personalisasi dan klientalisme dalam hubungan patronase politik baik kepada Negara maupun masyarakat.

Lantas, mengapa pola *local strongman* dapat tumbuh subur dalam suatu Negara? Lebih lanjut menurut Migdal (2001), setidaknya terdapat tiga faktor utama mengapa hal ini berlaku. *Pertama*, sifat masyarakat yang berjejaring, kemudian membuka peluang besar terhadap *klientalisme* tumbuh subur dan berkembang. Sehingga dominasi Negara terhadap masyarakat terbelah dan sebagiannya dikontrol oleh kekuatan-kekuatan informal. *Kedua*, hadirnya proses akulturasi mitos yang dikonstruksikan sebagai upaya mempertahankan legitimasinya dalam masyarakat. Akulturasi mitos ini dapat berupa tradisi, adat, norma atau simbol tertentu. Lebih lanjut, Olson (2000) menghuraikan dua strategi yang lazim digunakan oleh *local strongman* ini, yaitu dengan pola *stationary bandit* dan *roving bandit*.

Menurut Olson (2000), pola *stationary bandit* merujuk pada upaya elit memberi perlindungan atau berkontribusi pada kepentingan publik, sehingga masyarakat dapat meningkatkan produktifitasnya. Sehingga, semakin produktif masyarakatnya, semakin banyak manfaat dan kepentingan yang dapat 'dicuri' oleh elit. Sedangkan pola *roving bandit*, merujuk pada upaya mencuri manfaat sebanyak-banyaknya dari masyarakat tanpa meninggalkan apapun. Menurutnya, pola ini dapat menghadirkan ketidakstabilan bagi masyarakat dan elit sendiri. *Ketiga*, kemampuan *local strongman* menembus dan mengintervensi Negara. Pada praktiknya, negara secara realistis seringkali mengakomodir kehadiran *local strongman*. *Local strongman* pun, meski terkadang kesulitan untuk menembus atau mengintervensi negara, mereka akan masuk melalui masyarakat politik, seperti partai

politik.⁴ Karena itu tak heran lahir *triangle of accommodation* antara negara, partai politik dan *local strongman*. Sehingga menurut Migdal (2001), keberlangsungan *local strongman* juga tidak lepas dari penerimaan Negara terhadap mereka untuk mengamankan kepentingan Negara di level masyarakat. Begitu pula dengan *local strongman*, mereka juga berupaya mengamankan kepentingan elit yang lebih tinggi di atas mereka untuk memastikan kepentingan mereka tetap terlindungi. Namun sebaliknya, kehadiran *local strongman* juga dapat memberikan dampak negatif bagi Negara dengan berbagai tindakan koersif ataupun propaganda yang mempengaruhi legitimasi Negara dalam masyarakat. Karena itu, kehadiran *local strongman* dapat memberikan dampak positif dan juga negatif bagi negara.

Kedua, local bossism. Pandangan Migdal (2001) tentang kehadiran *local strongman* yang mencirikan “Negara yang lemah dan masyarakat yang kuat”⁵ ternyata mendapatkan penentangan dari Sidel (2005) yang mengkaji konteks politisasi demokrasi dalam masyarakat Filipina, Thailand dan Indonesia. Ia menemukan fakta elit yang berada dalam lingkup masyarakat bukan lahir karena lemahnya Negara dan masyarakat yang kuat, namun sebaliknya, akibat kuatnya Negara dan lemahnya masyarakat. Pandangannya ini dikenal dengan *local bossism*. Berkaca pada penelitian awalnya di Filipina, Sidel (1999) melihat bahwa *local bossism* lahir dari relasi kepentingan Negara dan sistem pasar. Artinya, Sidel (1999) melihat bahwa elit di ranah masyarakat adalah agen, *broker* atau bahkan representasi dari Negara. Pola kerja elit dalam konteks *local bossism* senantiasa berada di bawah koordinasi dan komando negara, dengan membentuk jejaring kerjasama dengan pembesar-pembesar partai politik, pengusaha, preman bahkan tokoh agama. Bahkan, elit pada konteks ini dapat pula menggerakkan aparatur negara mengikut kehendaknya yang dianggap mewakili upaya melindungi kepentingan negara.

Berbeda dengan elit pada konteks *local strongman*, elit pada konteks *local bossism* cenderung dinamis dan kurang permanen. Sebagaimana tampuk elit Negara – terutama di Negara demokrasi – yang kerap kali bergeser paska pemilihan umum berlangsung, *local bossism* ternyata juga demikian. Namun, kendala ini sering diakali oleh elit untuk terus menanamkan pengaruhnya, baik bagi masyarakat maupun hubungannya dengan Negara, seperti menempatkan kerabat dan kroni pada posisi-posisi strategis dalam wilayahnya;

⁴ Lebih lanjut silakan rujuk Gramsci (1971) tentang masyarakat politik.

⁵ “..... masyarakat yang kuat” bermaksud elit-elit yang mampu ‘menguasai’ masyarakat.

membentuk mesin politik sebagai alat pendulang suara; penempatan pejabat pada posisi yang dapat mengamankan kepentingannya; mengatur proyek dan aspirasi; mengatur peraturan daerah; mengatur pinjaman dari Bank Daerah; memberikan rekomendasi konsesi atau kontrak korporat, atau; menggunakan pendekatan yang represif dalam mengelola penentangan dari gerakan sipil. Ironisnya, strategi para *local bossism* ini terkandung juga dianggap sesuatu yang melindungi kepentingan elit di tingkat yang lebih tinggi (Negara) (Sidel, 2005).

C. Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif-analitis. Pada prosesnya, kajian ini menggunakan metode kepustakaan untuk menghuraikan fenomena terkait elit lokal sebelum 2005, dan kemudian menambahkan metode observasi dalam mengeksplorasi konstruksi, legitimasi dan eksistensi 'elit' yang berlaku selama 15 tahun terakhir.

D. Hasil dan Pembahasan

Seperti yang diutarakan sebelumnya, Aceh merupakan salah satu kawasan 'panas'⁶ di Indonesia. *Saking* panasnya, sebelum perjanjian MoU Helsinki 2005, Aceh hanya merasakan kondisi damai hanya dalam tempoh 10 tahun, yaitu sejak tahun 1966 hingga 1976. Dan perdamaian yang dirasakan saat ini, sejak tahun 2005 hingga 2020 adalah periode damai yang paling lama dirasakan Aceh selama menjadi bagian Indonesia di tahun 1945. Berbeda dengan masa ketika menjadi bahagian kolonialisme Belanda, Aceh berada dalam kondisi ketiadaan kekerasan kolektif sejak 1911 hingga 1942.⁷

Sejatinya, identitas politik Aceh telah terbentuk sejak masa Kerajaan Aceh sekitar abad ke-15. Masa itu wilayah Aceh kerap disinggahi para pedagang atau perantau dari berbagai bangsa. Apalagi hal ini juga didukung dengan lokasi geografis Aceh yang berada di pintu Selat Malaka. Tak heran, Aceh menjadi salah satu kawasan yang paling sibuk di Nusantara. Intensitas pertemuan beragam identitas kultur ini kemudian menjadikan Aceh

⁶ 'panas' disini bermaksud rentan terhadap konflik kekerasan.

⁷ Meskipun, masih terdapat banyak pembunuhan secara sporadik atau pemberontakan yang mengakibatkan korban jiwa baik bagi Belanda maupun masyarakat. Lebih lanjut silakan rujuk Anthony Reid (2006).

sebagai wilayah kosmopolit. Tak sedikit pula para pedagang dan perantau ini kemudian bertempat tinggal di Aceh (Lombard, 1986). Sedangkan pada konteks ideologi, masyarakat Aceh begitu lekat dengan Islam. Sebagai agama resmi, Kerajaan memajukan dan menjadikan Aceh sebagai pusat penyebaran Islam pada periode awal Islam menyebar ke seluruh nusantara. Begitu kuatnya, Islam mempengaruhi segala bentuk aspek adat, politik dan hukum kerajaan Aceh masa itu (Riddle, 2006). Kemudian, identitas politik Aceh diperkuat dengan iklim perang dan konflik. Yang terakhir adalah ketika Belanda berupaya menjajah Aceh sama halnya dengan kawasan lainnya di Nusantara. Upaya ini kemudian mendapatkan respon hebat dari masyarakat Aceh. Tak pelak, Perang Aceh merupakan perang yang paling sulit dan menghabiskan begitu banyak sumber daya bagi Belanda (Veer, 1985).

Meskipun identitas politik Aceh telah hadir jauh sebelum menjadi bagian Indonesia (Reid, Asal Mula Konflik Aceh, 2005), tetapi dalam konteks perang, dukungan masyarakat terutama pada golongan elit begitu penting dan dinamis. Namun tentu sesuai dengan kepentingan para elit yang dapat mempengaruhi khalayak yang lebih luas, termasuk dalam upaya mengintegrasikan Aceh ke tangan penguasa.

Strategi penguasa untuk menarik minat elit agar dapat bekerjasama mengintegrasikan Aceh ke tangan penguasa telah berlaku sejak periode Perang Aceh (1873-1911). Atas rekomendasi Snouck Hugronje,⁸ sejak 1890an Belanda mencoba memisahkan antara *uleebalang*⁹ dan ulama. Keduanya merupakan golongan elit yang berada dibalik kekuatan perlawanan Aceh semasa perang berlangsung. Belanda memilih *uleebalang* sebagai elit yang diharapkan dapat bekerjasama mengintegrasikan Aceh ke tangan mereka. Menurut Reid (2006), pada akhir 1890an, 102 *uleebalang* yang diakui bekerjasama dengannya diberikan tunjangan bahkan hampir setengah dari pendapatan yang dapat diperoleh dari wilayahnya. Peran *uleebalang* ditransformasikan menjadi lebih

⁸ Lebih lanjut silakan rujuk Gobee & Adriaanse (1991).

⁹ *Uleebalang* adalah golongan bangsawan yang memimpin dan mengontrol sebuah kenegerian atau nanggroe (wilayah setingkat kabupaten). Mereka dan keturunannya (dari pihak laki-laki) diberi gelar Teuku dan Cut secara turun temurun menurut adat. Ketika Belanda berkuasa, mereka memiliki hegemoni atas politik, ekonomi dan sosial masyarakat daerah yang dikelola olehnya (Usman, 2003).

kuat dari sebelumnya,¹⁰ mencakup kewenangan arbitrase dan perundang-undangan, termasuk memonopoli sektor ekonomi, pertanian dan perkebunan di wilayah mereka. Meskipun kebijakan di Aceh ini mendapat tentangan dari pusat pemerintahan kolonial di Batavia, kuasa kolonial di Aceh tetap bersikeras untuk menjalankan strategi ini. Karena tampaknya hanya itu jalan satu-satunya yang dapat melemahkan kekuatan pejuang Mujahidin yang telah menyebabkan kerugian terbesar bagi Belanda dibandingkan operasi militer lainnya (Zentgraaff, 1983). Oleh karena melemahnya kekuatan perlawanan ini, lebih dari 20,000 jiwa masyarakat Aceh tewas dalam periode 10 tahun (1899-1909) setelah strategi tersebut dilancarkan. Akibatnya, hal ini menanamkan rasa benci masyarakat terhadap pengkhianatan *uleebalang* yang berlanjut hingga kemudian hari (Siegel, 1969; Reid, 1979; Sulaiman, 1997).

Setelah berakhirnya kekerasan kolektif yang mengatasnamakan Kerajaan Aceh sejak 1911, kekuatan sosial-politik baru mulai muncul pada periode 1930an. Pendekatan politik etis yang diterapkan oleh Belanda pada sektor pendidikan, masuknya organisasi sipil dari tanah Jawa yang juga mendirikan institusi pendidikan, menginisiasi beberapa tokoh masyarakat Aceh untuk membentuk institusi-institusi sejenis. Kesadaran ini dilandasi keinginan kembali untuk menghimpun kekuatan dalam melawan Belanda. Salah seorang tokohnya ialah Teungku Muhammad Daud Beureueh. Melihat resistensi masyarakat untuk bersekolah pada institusi pendidikan milik Belanda atau *uleebalang*, serta terbatasnya penerimaan pada sekolah-sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah sejak tahun 1920an, menggerakkan Teungku Muhammad Daud Beureueh mendirikan *Jamiatul Diniyah* pada tahun 1930. *Jamiatul Diniyah* adalah konsep sekolah yang menggabungkan antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Berkat bantuan dari berbagai lapisan masyarakat, beberapa sekolah sejenis ini kemudian menyebar ke seluruh pesisir utara-timur Aceh. Karena peran dan kharismanya dalam membangun kembali semangat memajukan masyarakat Aceh ini, pada tahun 1939 Teungku Daud Beureueh terpilih menjadi Ketua Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), sebuah organisasi gerakan yang menghimpun kembali kekuatan tokoh-tokoh Aceh yang telah dibelah oleh Belanda dengan politik *divide et impera*-nya. Hal ini ternyata menghadirkan kekhawatiran luar

¹⁰ Sebelumnya *uleebalang* hanya diberikan hak untuk mengelola dan pemberi modal (Reid, Asal Mula Konflik Aceh, 2005).

biasa, baik bagi Belanda maupun sebagian besar *uleebalang* yang telah menikmati insentif dari pihak kolonial untuk mengontrol Aceh dari dalam. Klimaks dari eksistensi gerakan PUSA ialah keterlibatannya dalam mengusir Belanda ketika Jepang masuk ke Aceh pada awal 1942, serta menghancurkan beberapa kekuatan *uleebalang* yang menghalang masuknya Jepang ke Aceh (Reid, *Colonial Transformation: A Bitter Legacy*, 2006).

Kehadiran Jepang di Aceh menempatkan golongan PUSA yang terdiri dari para ulama dan simpatisannya menjadi elit baru. Yaitu posisi yang tidak pernah dirasakan oleh golongan non-*uleebalang* semenjak rekomendasi Hugronje diterapkan pada 1899. Namun hal ini tak bertahan lama, keberhasilan beberapa *uleebalang* dalam menghasut Jepang agar tidak sepenuhnya percaya terhadap golongan PUSA membuahkan hasil. Beberapa elit PUSA seperti Teungku Muhammad Daud Beureueh diinterogasi, dan beberapa orang lainnya dieksekusi dan PUSA dibubarkan. Namun karena kebutuhan akan dukungan masyarakat Aceh dalam Perang Dunia II, Jepang memberikan kuasa administrative dan agama kepada golongan PUSA. Beberapa *uleebalang* yang tidak senang kemudian dieksekusi, meskipun Jepang menginginkan kedua golongan elit ini dapat bersatu untuk memaksimalkan upaya Jepang memenangkan perang. Sentimen antar elit ini kemudian berlanjut hingga Jepang meninggalkan Aceh pada tahun 1945 (Reid, *Colonial Transformation: A Bitter Legacy*, 2006).

Paska Jepang menyerah, terjadi kevakuman kekuasaan di Aceh. Di satu sisi, beberapa *uleebalang* berupaya mengundang kembali Belanda ke Aceh. Sedangkan di sisi lain, golongan PUSA dan para pemuda yang telah mendapat pelatihan kemiliteran dari Jepang menolak mentah-mentah upaya ini. Lagipula, Belanda pun merasa enggan kembali untuk menanamkan pengaruhnya di Aceh, akibat trauma atas perlawanan masyarakat Aceh sebelumnya. Pun upaya untuk membentuk Negara sendiri tidak dianggap serius akibat pergolakan internal yang belum selesai. Dalam kondisi ini sebuah tawaran datang dari Jakarta untuk bergabung dengan konstruksi Negara baru bernama Republik Indonesia. Tawaran ini disambut baik oleh golongan PUSA dan beberapa *uleebalang* yang berafiliasi dengan PUSA dan jaringan-jaringan nasionalis di Jakarta. Beberapa golongan yang menolak rencana ini seperti Teuku Muhammad Daud Cumbok, *uleebalang* Lammeulo, Pidie, dan para pengikutnya dibantai habis. Kondisi ini ternyata memicu

kekerasan massal di seluruh penjuru Pidie.¹¹Bahkan tidak berhenti sampai disitu saja, peristiwa pembantaian para *uleebalang* di Pidie ternyata merambat hingga ke seluruh penjuru Aceh. Adalah Amir Husin Al-Mujahid, Ketua pemuda PUSA dan komandan pasukan mujahidin yang terinspirasi dari peristiwa di Pidie serta melihat masih banyaknya golongan *uleebalang* yang diberikan jabatan oleh Jakarta dengan melancarkan pembunuhan para *uleebalang* di sepanjang pesisir utara-timur hingga ke Aceh Besar. Kondisi ini juga memaksa Teuku Nyak Arief yang saat itu menjabat sebagai Residen pertama Aceh mengundurkan diri tak lama berselang setelah memperoleh jabatan tersebut. Sejak saat itu, golongan elit kembali berubah dan dipegang oleh kelompok PUSA, dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer (1945-1953).

Dalam periode 1945-1953, golongan PUSA, baik ulama maupun non-ulama ataupun simpatisannya melanjutkan estafet kekuasaan yang telah mereka pegang ketika masa Jepang, bahkan lebih besar. Golongan ini tergolong Islam reformis yang memadukan unsur modernitas dan tradisional. Hal ini yang kemudian membuat sebagian golongan ulama tradisional merasa terancam kepentingannya. Pada periode tersebut, Sjamsuddin (1990) melihat sebagian golongan ulama tradisional – termasuk sejumlah unsur *uleebalang* – mengaitkan diri mereka dengan Perti (Pergerakan Tarbiyah Islamiyah) sedangkan sebagian besar golongan PUSA bergabung dengan PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) berbanding mengaitkan diri dengan Partai Masyumi yang menghimpun sejumlah besar golongan reformis seperti Muhammadiyah. Bergabungnya sejumlah golongan PUSA dalam sistem kepartaian ini pula yang membuat Aceh semakin terintegrasi dengan Negara, termasuk pula golongan ulama tradisional dan para *uleebalang* yang mengikuti arus politik kala itu.

Perlu dipahami bahwa pada periode 1945 hingga 1949, Indonesia mengalami serangan dari Belanda yang berupaya mengambil kembali daerah jajahannya. Di Aceh, keadaan ini melahirkan beragam barisan gerakan kepemudaan dan sebagiannya dibekali pendidikan militer ketika Jepang hadir di Aceh, seperti Laskar Mujahidin, Barisan Pemuda

¹¹ Reid (2006) menyebut 23 dari 25 *uleebalang* yang terbunuh akibat eksekusi perang ini. Sedangkan Sulaiman (1977) menyebutkan lebih detail bahwa 98 orang *uleebalang* dan keluarganya di Pidie terbunuh akibat eksekusi dari perang di Cumbok ini (Sulaiman, 1997). Kemudian, terdapat perdebatan tentang proses bagaimana sebab golongan *uleebalang* cumbok menginginkan Belanda masuk kembali ke Aceh. Untuk lebih lanjut sila rujuk (Prang, 2008)

Indonesia (BPI) yang kemudian berubah menjadi Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Ikatan Pemuda Indonesia (IPI), dan sebagainya.

Keadaan agresi militer Belanda membuat kondisi pemerintahan Indonesia berada pada titik nadir. Kebijakan berganti-ganti dalam hitungan bulan, termasuk status Aceh yang berubah-ubah. Namun ketika Indonesia berada pada ambang kekalahan dan terpaksa membentuk Republik Indonesia Serikat, Aceh kemudian secara administrative digabungkan dengan Sumatera Utara (Amin, 1978).¹² Kebijakan ini menimbulkan gelombang protes yang cukup besar.¹³ Para pemimpin Aceh dan PUSA, termasuk Teungku Muhammad Daud Beureueh kemudian berkonsultasi bahkan datang ke Jakarta untuk membujuk para elit di level Nasional untuk membatalkan kebijakan tersebut. Namun hal itu tidak membuahkan hasil dan Aceh secara resmi bergabung dalam Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1950. Dan karena itu pula, Teungku Muhammad Daud Beureueh meletakkan jabatannya sebagai Gubernur Militer Aceh setelahnya. Keadaan ini menandakan perubahan berkurangnya pengaruh elit-elit PUSA di Aceh.

Setelah berlakunya pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di tahun 1953 akibat ketidaksenangan yang telah berada di titik klimaks,¹⁴ lingkaran elit - penyambung kepentingan dari Aceh ke pusat - bergeser ke arah yang berbeda. Pemerintah pusat mengkonstruksikan patron baru untuk mengintegrasikan kepentingan Jakarta dan Aceh. Dalam hal ini, para kaum muda yang mengesap pendidikan umum dan pernah berada dalam gerakan kepemudaan masa revolusi diproyeksikan menjadi golongan elit baru yang berbeda dengan golongan ulama reformis atau tradisional, ataupun yang tidak terlalu mengkaitkan dengan *trah ke-uleebalang-an*. Dalam hal ini, salah satu kebijakan Jakarta adalah membangun Kota Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma) Darussalam. Kompleks pendidikan tinggi ini dibangun dalam rentang akhir 1950an dan awal 1960an. Awalnya Universitas Syiah Kuala dan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry (sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry). Kemudian menyusul perguruan tinggi lainnya seperti Institut Ilmu Kejuruan dan Pendidikan (IKIP), Akademi Pemerintahan

¹² Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1950 tentang pembagian wilayah provinsi Republik Indonesia Serikat.

¹³ Alasan-alasan ketidaksenangan masyarakat Aceh terhadap kebijakan ini silakan rujuk pada Sjamsuddin (1990).

¹⁴ Dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh sendiri.

Dalam Negeri (APDN) dan Dayah Tinggi Teungku Chik Pantekulu (Taqwadin, 2016a). Tak lama kemudian institusi pendidikan tinggi ini dengan cepat menghasilkan generasi intelektual dan cendekiawan dan masuk ke dalam ruang-ruang politik dan kebijakan di Aceh yang didukung oleh Pemerintah Pusat.

Pengaruh generasi intelektual ini mulai terlihat paska turunnya legitimasi Soekarno (1965-1966) serta diiringi pula dengan penumpasan gerakan komunis di Aceh. Golongan ulama - bahkan mantan PUSA sekalipun - bersama militer dan golongan intelektual baru ini serta kaum pemuda juga ikut turut ambil bagian dalam proses penumpasan gerakan ini. Momentum ini tampak mempersatukan berbagai golongan yang dahulunya tercerai-berai. Dampaknya, hubungan antara Aceh dan Jakarta kembali menunjukkan tren positif paska pemberontakan DI/TII dengan intelektual baru atau dikenal dengan golongan teknokrat sebagai *leading figure*-nya (Morris, 1983; Hasan, 2003; McGibbon, 2006).

Ketika Muzakir Walad sebagai Gubernur Aceh (1968), para intelektual dan professional semakin mendapat tempat dalam pemerintahan Aceh. Hubungan antara intelektual dan birokrat semakin erat. Para intelektual pun semakin banyak masuk menjadi elit (teknokrat). Begitu pula dengan militer yang sangat dominan ketika Soeharto duduk di kursi kepresidenan. Tiga (3) unsur - intelektual, birokrat dan militer - ini membentuk hubungan simbiosis informal yang menempatkan ketiganya sebagai agen untuk mengintegrasikan Aceh jauh lebih dekat ke Pusat. Lagipula, hubungan simbiosis ini juga mendapat dukungan dari investor atau pengusaha besar yang menanamkan modalnya di Aceh (Hasan 2003). Di lain hal, hubungan ketiga unsur ini juga berhasil meminimalisir perkembangan kebijakan berkaitan dengan syariat Islam, pendidikan Islam dan adat istiadat. Hal ini didukung pula dengan kebijakan sentralistik dan penegasan Pemerintah Pusat bahwa Pancasila sebagai ideologi tunggal (McGibbon, 2006).

Selain itu, pemerintahan Orde Baru juga membangun sistem patronase berbasis *sanctions & rewards* yang mengikat golongan elit di level provinsi, level kabupaten/kota, hingga elit di level akar rumput. Sehingga para elit-elit ini senantiasa menjadi agen bagi Negara. Praktis, hal ini memberikan efek yang cukup besar kepada golongan ulama, terutama yang berbeda pandangan dengan Pemerintah Pusat dengan jalan mengucilkan mereka dari program-program pembangunan Negara. Tak heran, banyak ulama yang

memilih jalan aman dan bekerja sama dengan golongan elit ini (Morris, 1983; McGibbon, 2006).

Namun begitu, para teknokrat yang berkuasa selama Orde Baru kurang memiliki dukungan populer dari masyarakat akar rumput.¹⁵Naiknya mereka ke kursi Pemerintahan tidak lepas dari kepakaran dan relasi yang kuat dengan Pemerintah Pusat. Tidak seperti ulama, teknokrat tidak memiliki basis massa kuat di Aceh (Alfian, 1975; Schlegel, 1979).¹⁶ Menurut McGibbon (2006), sepeninggal Ibrahim Hasan, *spirit* dan visi *teknocratic* dalam tubuh elit Aceh semakin memudar. Syamsuddin Mahmud yang memiliki status yang tinggi dalam jenjang akademik dan dikenal dengan integritasnya tidak mampu melanjutkan semangat yang dahulu dimiliki oleh Hasan. Pengaruh teknokrat semakin tergerus dengan menguatnya peran militer di Aceh, akibat meningkatnya intensitas perlawanan dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM), serta desakan yang ditimbulkan oleh masyarakat sipil untuk menyelesaikan konflik Aceh yang telah berlangsung sejak 1976.

Paska kejatuhan Soeharto di tahun 1998, GAM juga tidak tinggal diam menggunakan momentum ketidakstabilan politik di level nasional untuk memperluas pengaruhnya di Aceh. Gerakan masyarakat sipil muncul di saat legitimasi elit di level provinsi sedemikian lemah. Golongan teknokrat yang dahulunya nyaman pada posisi elitis pun tak mampu menangani masalah tersebut karena lemahnya pengaruh mereka pada level akar rumput (McGibbon, 2006). Hanya militer dan aparat keamanan yang memegang kendali aspek politik dan hukum di Aceh kala itu. Dalam kevakuman elit ini, gerakan sipil bergerak menuntut referendum bagi Aceh. Gerakan ini dikoordinasi oleh SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh), yang terdiri dari berbagai organisasi, pemuda, mahasiswa, politisi, jurnalis dan berbagai lapisan masyarakat lainnya. Gerakan ini mencoba mendongkrak posisinya menjadi elit baru sebagai tandingan elit-elit lama (*counter-elites*) yang berkontribusi dalam menjaga ritme konflik dan kekerasan serta kepentingan pusat di Aceh (McGibbon, 2006). Malangnya, gerakan ini disambut dengan operasi militer dan

¹⁵ Terhitung paska pemerintahan Muzakkir Walad, tiga orang mantan Rektor Unsyiah sempat mengisi kursi Gubernur Aceh selama beberapa periode yaitu: Prof. Dr. Ibrahim Madjid (1978-1981), Prof. Dr. Ibrahim Hasan (1986-1993) dan Prof. Dr. Syamsuddin Mahmud (1993-2000).

¹⁶ Walaupun kebanyakan mereka memiliki relasi keluarga dengan ulama yang berpengaruh di level bawah, namun pendidikan barat memisahkan mereka dengan masyarakat dan cenderung lebih dekat kepada Pemerintah Pusat. Hal ini tampak terlihat ketika Ibrahim Hasan digantikan oleh Syamsuddin Mahmud pada 1993.

keamanan oleh militer dan kepolisian. Labelisasi dan kriminalisasi juga disematkan kepada elemen-elemen dalam gerakan ini (YLBHI, 2003).

Meskipun demikian, momentum gerakan sipil ini juga ditanggapi oleh golongan ulama tradisional yang tergabung dalam Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA). Golongan ini berupaya merevitalisasi posisi ulama dalam konteks sosial dan politik Aceh yang sudah tergerus dalam periode Orde Lama dan Orde Baru. Munculnya golongan ini menimbulkan kecurigaan para elit di provinsi dan pusat, karena selalunya berada dalam posisi pasif ketika konflik berlaku. Begitu pula dengan GAM yang melihat gerakan ini berpotensi menjadi aliansi Pemerintah serta menjadi rival baru dalam mempengaruhi masyarakat di level *grassroot*. Karena meningkatnya tekanan baik dari pihak militer dan keamanan serta GAM, HUDA kemudian keluar dari keterlibatannya dalam gerakan sipil paska Sidang Umum Majelis Pejuang Referendum Aceh di tahun 1999. Apalagi dengan terjadinya peristiwa pembantaian yang dialami oleh Teungku Bantaqiah dan santrinya di Nagan Raya (sebelumnya Aceh Barat) menghentak kesadaran golongan ini akan resiko yang begitu tinggi, sehingga memilih keluar dari lingkaran aktor yang mengganggu eksistensi Pusat di Aceh (McGibbon, 2006).

Walaupun konflik dan kekerasan tetap berlaku, Aceh juga ikut terbawa dalam arus reformasi demokratisasi paska lengsernya Soeharto. Setelah posisi Gubernur dijabat sementara oleh Ramli Ridwan, Abdullah Puteh kemudian terpilih sebagai Gubernur pada Pemilu 2000. Puteh adalah pengusaha Aceh yang menetap di Jakarta dan memiliki afiliasi kuat dengan Pemerintahan Orde Baru. Artinya meskipun Orde Baru telah usai, tapi golongan elitnya masih memiliki relasi yang sangat dekat Soeharto. Puteh pun tampak tidak serius menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh yang telah berlarut-larut. Meskipun Puteh berusaha menghimpun kembali kekuatan teknokrat, intelektual dan politisi yang tergabung dalam lingkaran elit Aceh dahulunya, tetap tidak memberikan dampak signifikan bagi karirnya. Lagipula, kuasa militer dan aparat keamanan begitu besar di Aceh sehingga membatasi gerak langkah Puteh dalam masa pemerintahannya (McGibbon, 2006). Para elit dalam pemerintahan pun tampak benar-benar tak berdaya, meskipun beberapa diantaranya bersama dengan golongan gerakan sipil yang 'selamat' dari

kriminalisasi aparat keamanan, mencoba menginisiasi komunikasi dengan elit nasional untuk menyupayakan penyelesaian konflik dan kekerasan di Aceh.¹⁷

Iklim politik berubah drastis setelah Aceh diterjang oleh gelombang tsunami di penghujung Desember 2004. 132.000 jiwa meninggal, 37.000 jiwa dinyatakan hilang serta ratusan ribu lainnya mengalami luka-luka akibat terjangan ini. Kekuatan GAM, militer dan aparat keamanan juga tak luput menjadi korban (Hamid, 2006). Di sisi lain, bencana ini menarik simpati masyarakat internasional. Terhitung hampir 6 triliun US Dollar mengalir dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 16.000 personel militer dan puluhan ribu relawan kemanusiaan dari berbagai Negara, 9 kapal induk, 14 kapal perang, 31 pesawat pengangkut, dan 75 helikopter diterjunkan dalam misi kemanusiaan terbesar paska Perang Dunia kedua (Prasetyo, 2009). Bencana ini 'membuka' Aceh yang sebelumnya ditutup aksesnya bagi pemberitaan asing. Hal ini pula yang kemudian melicinkan proses perdamaian di Aceh (Taqwadin, 2011). Dan akhirnya pada tanggal 15 agustus 2005, *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki ditandatangani oleh pihak Pemerintah Indonesia dan GAM. Menandakan berakhirnya konflik kekerasan setelah 29 tahun. Perdamaian ini membuka peluang dan kesempatan baru bagi masyarakat Aceh dalam mengisi ruang elit pada konteks sosial, ekonomi dan politik.

Paska damai, Aceh disibukkan dengan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana. Agenda paska tsunami ini juga dilakukan beriringan dengan agenda paska damai. Tak sedikit pula program paska tsunami yang mengalir ke agenda paska damai. Banyak pula penerima manfaat dari program paska tsunami juga merupakan korban konflik yang diprioritaskan. Saking besarnya dua program pembangunan yang berjalan beriringan ini, akhirnya melahirkan lapangan pekerjaan yang luas bagi para pengusaha konstruksi atau dikenal dengan 'kontraktor'. Mereka menjadi 'orang kaya baru' yang paling diuntungkan dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi kala itu. Berbanding sebelumnya, pekerjaan konstruksi dan pembangunan terbatas pada lingkungan di sekitar elit saja, namun pada masa tersebut, kesempatan untuk mendapatkan kerja-kerja pembangunan terbuka lebar bagi siapapun. Sehingga distribusi ekonomi yang dahulunya terbatas pada sekelompok orang yang berada di lingkaran elit, kemudian berubah menjadi

¹⁷ Lebih lanjut silakan rujuk (Hamid, 2006).

merata. Dari sini, golongan elit baru atau golongan yang memberikan *supply* kepada elit semakin bertambah.

Selain itu, kerja-kerja pembangunan juga melibatkan banyak lembaga, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau dikenal pula dengan NGO (*Non-Governmental Organization*). Pada prosesnya, banyak program yang juga melibatkan masyarakat akar rumput. Dalam hal ini, muncul stigma jurang antar kelas antara pekerja NGO¹⁸ dan masyarakat biasa. Pekerja NGO sebagai 'kelas yang memperkerjakan' dan masyarakat biasa sebagai yang 'diberikan pekerjaan'. Akhirnya muncul semacam stigma bahwa terlibat dalam NGO dapat meningkatkan status sosial. Fenomena ini ternyata meletakkan landasan munculnya para elit dari golongan ini di kemudian hari.

Selain munculnya dua aktor baru tersebut, mantan anggota GAM kemudian bertransformasi menjadi elit-elit baru. Sayap militer GAM berubah menjadi lembaga sipil bernama Komite Peralihan Aceh (KPA). Lembaga ini menghimpun seluruh kekuatan militer dan sipil GAM dalam masa awal transisi. Namun pada masa awal tersebut, GAM belum membentuk kendaraan politik untuk melanjutkan perjuangan politik Aceh – dalam bingkai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Meskipun tanpa kendaraan politik, pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang diselenggarakan setahun setelah damai berhasil memenangkan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar dari unsur GAM dan SIRA.

Paska pemilukada 2006, KPA mendirikan sayap politik bernama Partai Aceh (PA) pada 2007. PA merupakan salah satu partai politik lokal yang keberadaannya diakomodir berkat MoU Helsinki. Tidak lama, PA menjadi kekuatan politik besar dalam kontestasi demokrasi lokal. Pada pemilihan legislatif 2009 saja, PA berhasil meraih 33 (tiga puluh tiga) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari 81 (delapan puluh satu) kursi yang diperebutkan.¹⁹ Praktis, keberhasilan menduduki kursi eksekutif dan sebagian besar kursi legislatif menempatkan golongan ex-kombatan sebagai elit baru di Aceh. Di belakang elit ini berdiri golongan kontraktor dan pekerja NGO yang notabene sebagian besarnya merupakan mantan aktivis gerakan sipil semasa konflik.

¹⁸ Sebagian pekerja NGO ini berasal dari elemen masyarakat sipil yang dahulunya terlibat dalam proses penyelesaian konflik.

¹⁹ Lihat <https://aceh.tribunnews.com/2019/05/11/ini-wajah-baru-anggota-dpra>

Perubahan tatanan elit ini memberikan warna berbeda dengan elit-elit sebelumnya yang selalu *inggih* dengan instruksi Jakarta. Golongan mantan kombatan menghadirkan '*cara main*' yang lebih 'garang dan percaya diri' ketika berhadapan dengan Pemerintah pusat. Perasaan ini lahir dari aspek 'kekhususan' berlandaskan MoU Helsinki yang diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selain itu, Aceh juga memiliki aspek 'keistimewaan' yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Maka tak heran, berbagai konfrontasi psikologis seringkali berlaku ketika masa-masa awal paska damai, dari persoalan pembentukan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh (Taqwaddin et.al., 2009), persoalan bendera Aceh yang mirip dengan GAM (Wijaya, Anggraeni, & Apriani, 2016), persoalan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (Ulya, 2017), dsb.

Ironisnya, Aceh yang secara politik dikontrol oleh sekumpulan elit ini, tetapi secara hukum dan pemikiran masih dipengaruhi oleh Pemerintah pusat. Nilai tawar elit ini pun semakin melemah seiring retaknya internal golongan mantan kombatan sejak menjelang Pilkada 2012 (Ansori, 2012). Lebih jauh, kondisi ini juga berhasil menggoyahkan eksistensi elit mantan kombatan pada konteks politik kepemiluan di level Kabupaten/Kota hingga saat ini. Dalam perjalanannya, dinamika politik di Aceh tidak hanya diisi oleh elit ex-GAM, kontraktor dan mantan aktifis gerakan sipil. Sejak 2010, gesah gerakan berorientasi Islam kembali muncul perlahan. HUDA yang dahulu sempat vakum menggeliat kembali, terutama dalam mendukung kebijakan syariat Islam. HUDA mengkonstruksi dan *mem-framing* ulama sebagai patron syariat. Selain HUDA, berbagai komunitas dan masyarakat akar rumput juga menjadi agen dalam konstruksi ini. Namun mirisnya, *ulama* atau tokoh agama seringkali alat untuk mengintegrasikan kepentingan politik elit dengan basis sosial yang dimilikinya. Hal ini tampak di beberapa kontestasi pemilihan umum sejak Pemilihan Gubernur 2012, yang berlanjut pada konteks Pemilu Legislatif, hingga Pilkada baik di level gubernur maupun kabupaten/kota.

D. Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak bahwa terdapat perbedaan konstruksi elit, legitimasi yang diperoleh, serta eksistensi elit dalam lingkup politik di Aceh, baik pada

masa kolonial Belanda maupun ketika Aceh terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasca kejatuhan Kerajaan Aceh (1904), Belanda berhasil bekerjasama dengan sebagian golongan *uleebalang* untuk memecah belah masyarakat Aceh. Strategi ini cukup jitu untuk melemahkan masyarakat yang masih saja memberikan perlawanan kepada Belanda, meskipun Sultan secara resmi telah menyerahkan diri. Pada masa itu, *uleebalang* dikonstruksikan sebagai elit yang mampu mengintegrasikan masyarakat ke tangan penguasa kolonial.²⁰ Kewenangan yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya diberikan kepada *uleebalang* terhadap wilayah dan masyarakatnya,²¹ mencakup kewenangan arbitrase dan perundang-undangan, termasuk memonopoli sektor ekonomi, pertanian dan perkebunan di wilayah mereka. *Uleebalang* dalam hal ini diberikan legitimasi secara legal-rasional oleh penguasa kolonial. Dan pada prosesnya golongan ini bertindak layaknya *local bossism* yang berupaya menjaga mengintegrasikan Aceh ke tangan penguasa. Artinya, pada konteks tersebut Pemerintah kolonial dipandang lebih kuat daripada masyarakat.

Namun pola ini kemudian berubah ketika golongan ulama muncul dengan cara alternatif menentang Belanda, termasuk mengundang Jepang masuk ke Aceh di tahun 1942. Berbeda dengan *uleebalang*, ulama dipandang memiliki basis massa lebih besar. Alasan ini menghadirkan nilai tawar yang lebih besar bagi pihak penguasa kala itu. Pada konteks ini, golongan PUSA yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh menempatkan dirinya sebagai *local strongman*. Hadirnya legitimasi pada Teungku Muhammad Daud Beureueh dikarenakan faktor kharisma. Selain itu, ia dianggap sebagai sosok yang mampu menyatukan para ulama lainnya untuk menentang Belanda dan mengintegrasikan Aceh ke dalam tubuh Republik Indonesia kala itu. Dalam perjalanannya, Teungku Muhammad Daud Beureueh dan golongan PUSA terus berada sebagai lingkaran elit hingga tahun 1950. Namun, tak lama kemudian, Daud Beureueh memimpin pemberontakan DI/TII di tahun 1953.

²⁰ Pasalnya, golongan *uleebalang* sebelumnya memang telah memiliki kuasa feodal yang diberikan hak oleh Sultan untuk mengelola suatu wilayah.

²¹ Sebelumnya *uleebalang* hanya diberikan hak untuk mengelola dan pemberi modal (Reid, Asal Mula Konflik Aceh, 2005).

Paska Daud Beureueh dan PUSA, Pemerintah pusat berusaha mengkonstruksikan elit lokal yang berasal dari golongan intelektual. Golongan intelektual yang disebut dengan teknokrat ini berasal dari lingkungan akademisi. Persoalannya, para teknokrat ini tidak memiliki basis massa di level akar rumput. Para intelektual ini memiliki karakter *local bossism* yang menjalankan dan menjaga kepentingan pusat terhadap Aceh. Sehingga, meskipun Aceh berada dalam kondisi konflik berdarah yang bermula sejak 1976, tidak banyak yang dapat dilakukan oleh golongan ini untuk menyelesaikan persoalan ini.

Warna elit Aceh berubah drastis setelah penandatanganan MoU Helsinki 2005 antara GAM dan Pemerintah Indonesia. Golongan mantan kombatan menjadi golongan elit baru. Eksistensi golongan ini didukung oleh golongan kontraktor baru dan pekerja NGO yang bermunculan seiring dengan massifnya kerja-kerja rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana tsunami dan paska konflik. Hal ini juga didukung oleh kondisi demokrasi dan dinamika politik yang hidup berbanding ketika konflik ataupun saat Soeharto berkuasa. Golongan ini terpilih secara legal-rasional dalam sistem dan kondisi demokrasi yang cukup sehat. Pada prosesnya pula, golongan ini menempatkan diri sebagai *local strongman*. Di konteks lokal, hal ini lahir dari kesadaran akan kekhususan dan keistimewaan yang lahir dari perjuangan GAM mengangkat senjata sekian lama. Sedangkan di konteks nasional, *bargaining* yang ditawarkan kepada Pemerintah pusat bahwa GAM mewakili alasan dasar pembentukan MoU Helsinki, yaitu mentransformasikan perjuangan politik GAM dengan cara-cara bersenjata kepada cara-cara yang lebih diplomatis dan elegan.

Pada akhirnya, meskipun jauh dari sempurna, artikel ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para sarjana untuk memahami dinamika elit lokal di Aceh dan bagaimana hubungannya dengan penguasa.

Referensi

- Amin, S. (1978). *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau*. Jakarta: Padnya Paramita.
- Ansori, M. (2012). From Insurgency to Bureaucracy: Free Aceh Movement, Aceh Party and the New Face of Conflict. *Stability: International Journal of Security and Development*, 1(1), 31-44.

- Aspinall, E. (2006). Violence and Identity Formation in Aceh under Indonesian Rule. In A. Reid, *Verandah of Violence; The Background to the Aceh Problem* (pp. 149-176). Singapore: Singapore University Press.
- Dahl, R. A. (1957). The Concept of Power. *Behavioral Science*, 201-215.
- Etzioni-Halevy, E. (1993). *The Elite Connection: Problems and Potential of Western Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Gobee, E., & Adriaanse, C. (1991). *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hugronje Semasa Kepegawaianya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*. Jakarta: INIS.
- Gramsci, A. (1971). *The Prison Notebooks*. (Q. Hoare, & G. N. Smith, Trans.) London: Lawrence & Wishart.
- Hamid, A. F. (2006). *Jalan Damai Nanggroe Endatu; Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*. Jakarta: Penerbit Suara Bebas.
- Hasan, I. (2003). *Namaku Ibrahim Hasan: Menebah Tantangan Zaman*. Jakarta: Yayasan Malem Putra.
- Lombard, D. (1986). *Kerajaan Aceh, Jaman Sultan Iskandar Muda*. (W. Arifin, Trans.) Jakarta: Balai Pustaka.
- McGibbon, R. (2006). Local Leadership and the Aceh Conflict. In A. Reid, *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Conflict* (pp. 315-359). Singapore: Singapore University Press.
- Michels, R. (2001). *Political Parties: A Sociological Study of The Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. (E. Paul, & C. Paul, Trans.) Kitchener: Batoche Books.
- Migdal, J. (2001). *State in Society: Studying how States and Societies Transform and Constitute One Another*. New York: Cambridge University Press.
- Morris, E. E. (1983). *Islam and Politics in Aceh: A study of Center-Periphery Relations in Indonesia*. Los Angeles: Cornell University.
- Mosca, G. (1939). *The Rulling Class*. New York: McGraw Hill.
- Murziqin, R. (2016). Aceh Paska MoU Helsinki. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 1(2), 1-11. <https://doi.org/10.22373/jai.v1i2.475>.
- Olson, M. (2000). *Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships*. New York: Basic Books.
- Pareto, V. (1935). *The Mind and Society*. London: Jonathan Cape.
- Prang, A. J. (2008). *Aceh, dari Konflik ke Damai*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Prasetyo, S. A. (2009). Background and Political Situation in Aceh. In S. A. Olle Tornquist, & T. Birks (Ed.), *The Role of Democracy fo Peace and Reconstruction*. Jakarta: PCD Press Indonesia & ISAI.
- Reid, A. (1979). *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

- Reid, A. (2005). *Asal Mula Konflik Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Reid, A. (2006). Colonial Transformation: A Bitter Legacy. In A. Reid, *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem* (pp. 96-108). Singapore: Singapore University Press.
- Riddle, P. G. (2006). Aceh in Sixteenth and Seventeenth Centuries: "Serambi Mekkah" and Identities. In A. Reid, *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem* (pp. 38-51). Singapore: Singapore University Press.
- Scott, J. (1991). *Who Rules Britain?* Cambridge: Polity Press.
- Sidel, J. T. (1999). *Capital, Coercion, and Crime: Bossism in the Philippines*. Stanford: Stanford University Press.
- Sidel, J. T. (2005). Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand dan Indonesia. In J. Harris, K. Stokke, & O. Tornquist, *Politikasi Demokrasi Politik Lokal Baru*. Jakarta: Demos.
- Siegel, J. T. (1969). *The Rope of God*. Los Angeles, US: University of California.
- Sjamsuddin, N. (1990). *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sukma, R. (2004). Security, Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons. *Policy Studies* 3, 47-55.
- Sulaiman, M. I. (1997). *Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan terhadap Tradisi (1942-1962)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Taqwaddin et.al.(2009). *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (Perspektif Partisipatif di Aceh)*. Banda Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah.
- Taqwadin, D. A. (2011). The Moment of Ripeness: Involvement of Third Parties Mediator in Aceh Peace Process. *Aceh Development International Conference*. Kuala Lumpur: TARSA Malaysia.
- Thamrin Z. (2004). *Aceh Melawan Penjajahan Belanda*. Jakarta: Wahana.
- Ulya, Z. (2017). Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh: Re-Formulasi Legalitas KKR Aceh. *Petita*, 2(2), 135-154.
- Usman, A. R. (2003). *Sejarah Peradaban Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Veer, P. V. (1985). *Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hugronje*. Jakarta: Grafitipers.
- Vergara, L. G. (2013). Elites, Political Elites and Social Change in Modern Societies. *Revista De Sociologia*, 31-49.
- Weber, M. (1968). *Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology*. New York: Bedminster Press.
- Wijaya, E., Anggraeni, R., & Apriani, L. (2016). Problem Pengesahan Bendera Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemetaan Permasalahan). *Padjajaran, Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 154-172.
- Williams, R. (1958). *Culture and Society: 1780-1950*. Harmondsworth: Penguin Books.

YLBHI.(2003). *Pekerja HAM dan Kemanusiaan dalam Keadaan Darurat Militer di Aceh*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Zentgraaff, H. (1983). *Aceh* (1st ed.). (A. B. Atjeh, Trans.) Jakarta: Penerbit Beuna.